

DATA PROLEGDA TAHUN 2014 DAN PERKEMBANGANNYA

Instansi : Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima

Tanggal : 25 Agustus 2014

1. Dibawah ini adalah tabel data prolegda tahun 2014

NAMA DAERAH	Jumlah Ranperda dalam Prolegda 2014	Jumlah Prolegda 2013 yang diluncurkan/lanjutan pembahasannya di tahun 2014	Jumlah Prolegda yang sudah dalam pembahasan DPRD	Jumlah Prolegda 2014 yang diajukan masuk sebagai tambahan ke dalam Prolegda 2014	Jumlah Raperda tahun 2014 yang sudah menjadi Perda	KET
KABUPATEN BIMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Pertambangan, mineral dan batuan. 3. Pembentukan, kedudukan, tugas, pokok dan fungsi organisasi satuan pamong praja. 4. Perubahan atas 6 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 5. Pengendalian telekomunikasi dan informasi. 6. Penanaman modal daerah. 7. Pendataan kependudukan di Kabupaten Bima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Pertambangan, mineral dan batuan. 3. Pembentukan, kedudukan, tugas, pokok dan fungsi organisasi satuan pamong praja. 4. Perubahan atas 6 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 5. Bangunan gedung. 6. APBD tahun anggaran 2015. 7. Rencana detail tata ruang ibukota Kabupaten Bima. 8. Ruang Kawasan strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2013. 2. Pendataan kependudukan di Kabupaten Bima. 3. Bangunan gedung. 	-	-	

	<p>8. Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2013.</p> <p>9. Perubahan atas APBD tahun anggaran 2014</p> <p>10. Bangunan gedung.</p> <p>11. APBD tahun anggaran 2015</p> <p>12. Rencana detail tata ruang ibukota Kabupaten Bima.</p> <p>13. Ruang Kawasan strategis KTM tambora.</p> <p>14. Kerja sama daerah.</p> <p>15. Tata cara pembentukan pertauran daerah.</p> <p>16. Pengelolaan hutan bersama rakyat.</p> <p>17. Badan usaha milik daerah.</p> <p>18. Perubahan atas perda nomor 2 tahun 2009 tentang penyertaan modal daerah kabupaten bima.</p> <p>19. Pengelolaan persampahan.</p> <p>20. Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>21. Perguruan tinggi</p>	<p>KTM tambora.</p> <p>9. Kerja sama daerah.</p> <p>10. Tata cara pembentukan pertauran daerah.</p> <p>11. Pengelolaan hutan bersama rakyat.</p> <p>12. Badan usaha milik daerah.</p> <p>13. Perubahan atas perda nomor 2 tahun 2009 tentang penyertaan modal daerah kabupaten bima.</p> <p>14. Pengelolaan persampahan.</p> <p>15. Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.</p> <p>16. Perguruan tinggi.</p>				
--	---	--	--	--	--	--

2. Kendala- lenda yang dihadapi Pemerintah daerah pada saat penyusunan Prolegda antara lain adalah sebagai berikut :

- Ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penyusunan materi draf Raperda.
- Lemahnya koordinasi dengan stakeholder lain
- Penyesuaian jadwal rapat pembahasan dengan jadwal pelaksanaan tugas dan kegiatan antar stakeholder yang saling berbenturan.

DATA PERATURAN DAERAH TAHUN 2013 dan TAHUN 2014

NAMA DAERAH	Data Peraturan Daerah Tahun 2013	Data Peraturan Daerah Tahun 2014
	Nama dan Nomor Perda	Nama dan Nomor Perda
Kabupaten Bima	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA Kab. Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 2. PERDA Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2012 3. PERDA Kab. Bima Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 4. PERDA Kab. Bima Nomor 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu 5. PERDA Kab. Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Larangan Produksi, penjualan, pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol 6. PERDA Kab. Bima Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bima Tahun Anggaran 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA Kab. Bima Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah 2. PERDA Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAHMATULLAH, SH
Nip.196908251994031010